

**Determinant Digital Learning Based Inclusive School****Abdul Basit<sup>1</sup>, Renny Candradewi Puspitarini<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup> Civic Education Department Panca Marga University  
abdulbasit@upm.ac.id**Abstract**

*The problems of research are: a) the lack of teacher and student readiness to learn, b) the lack of Wi-Fi speed, c) the level of dependent on school operator, and d) the lack of learning methodology. Based on those problems, this research aims to to strengthen the learning outcomes expected by PPKn (civic study teacher) subject teachers in providing excellent service not only in learning process but also activities outside the classroom at inclusive schools. Research informants involved in this research are inclusive students (with special needs), teachers with the initials AH, S, school principals of the initials YES, 3 inclusive mentor teachers with initials of RAA, TM and BH as well as SRH / school principals as primary sources /key informants. Secondary informants also involved researchers such as the community, school committees, school supervisors, counseling teachers with the initials JK. This research approach uses qualitative research in the form of analytical descriptive. The process of collecting data uses observation, interviews and documentation studies. The result is there is effectiveness of education and training followed by teachers. Students' learning motivation increases compared to using classical methods such as lectures and is monotonous and mundane. This is caused by the efforts of teachers in utilizing IT properly. Teachers use IT learning, not only in the I-Spring Suite and Edmodo applications owned by the school, but also compile questions through the Google form so that synchronization of questions is no longer dependent and waiting for school operators. Teachers can operate on their own according to school rules and regulations. However, inclusion students are treated differently and given different questions / questions. This also relates to the 2013 curriculum that has been used by teachers with necessary modification, especially for inclusive students.*

**Keywords:** *Digital Learning, Diklat, Inclusive Students***I. PENDAHULUAN**

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan penyetaraan pada setiap jenjang pendidikan. Pendidikan inklusif diselenggarakan oleh pemerintah, sebab masih ada diskriminasi pendidikan yang ada di sekitar kita. Padahal secara konstitusional yang termaktub dalam pasal 28C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sangat jelas melindungi hak setiap orang tanpa terkecuali, bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan.....". Penyelenggaraan pendidikan inklusi akan dinilai oleh pemerintah dengan usulan dan pengajuan dari lembaga

pendidikan/sekolah. Saat ini, untuk jenjang Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) dikelola oleh pemerintah pendidikan kota atau kabupaten, sedangkan pendidikan menengah (SMA/ sederajat) dikelola atau dibawah naungan Pemerintah Provinsi (Basit, 2019). Hal ini dilakukan guna peningkatan mutu pendidikan secara umum dan sesuai target pemerintah (wajib belajar 12 tahun). Pemerintah provinsi sendiri memberikan program gratis berkualitas (tistas) yang berlaku mulai tahun akademik 2019-2020 pada jenjang pendidikan menengah termasuk di Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusi. Sekolah inklusi disini diartikan



sebagai suatu lembaga yang memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada siswa inklusi (special needs) untuk berbaaur dan berkolaborasi dengan siswa normal/reguler. Keberadaan siswa inklusi atau juga dikenal dengan istilah anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki perlakuan tersendiri oleh guru. Pada sekolah inklusi, guru dituntut memodifikasi perangkat pembelajaran yang dibuat dengan mengedepankan aspek toleransi, karakter, dan sesuai visi-misi sekolah. Di samping itu, sekolah inklusi wajib memiliki guru pendamping inklusi yang tugasnya adalah memantau perkembangan dan aktivitas mereka baik di dalam kelas maupun luar kelas (Basit, 2019).

Anggraeni (2018) juga menambahkan bahwa siswa inklusi juga diberi penilaian berbeda dengan siswa reguler, misal dalam pemberian soal ujian atau tugas. Jika pemberian soal disamakan dengan reguler, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam pengerjaannya. Sebab, mereka (siswa inklusi) memiliki jenis ketunaan yang berbeda seperti yang terdapat di SMK Negeri 3 Probolinggo. Jenis ketunaan yang terdapat di sekolah berbagai macam, mulai dari borderline, tuna rungu, autis, daksa, slow learner, reterdasi mental, sampai pada lambatnya belajar. Sebagai salah satu sekolah inklusi yang ditunjuk oleh Pemerintah, SMK Negeri 3 memiliki siswa inklusi sebanyak 22 orang. Adapun satu anak inklusi dipegang oleh 1 orang guru pendamping. Guru pendamping tersebut sebelumnya telah memiliki sertifikat sebagai peserta diklat inklusi. Jadi, sekolah dalam hal ini

dipimpin oleh Ibu STR sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Probolinggo tidak sembarangan menunjuk guru sebagai pendamping inklusi. Hal ini juga didukung oleh Pemerintah Kota probolinggo dalam meningkatkan dan mengembangkan keberlanjutan pendidikan inklusif seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Seminar Pendidikan Inklusi yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mewakili Walikota Probolinggo

Pada kegiatan seminar pendidikan inklusi, Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen untuk terus berupaya membangun sinergi dengan sekolah inklusi dan masyarakat terkait kebutuhan yang dialami khususnya bagi warga kota Probolinggo. Pemerintah menjamin upaya keberlanjutan dari temuan masalah yang ada di tingkat satuan pendidikan pada semua jenjang, mulai SD sampai dengan SMA.

Namun, permasalahan yang muncul di lapangan adalah masih ada beberapa guru yang mengenyampingkan kebutuhan siswa inklusi. Guru masih memiliki mindset ketuntasan materi pembelajaran yang menjadi prioritas. Minimnya metodologi pembelajaran yang dilakukan oleh guru juga menjadi latar belakang pembelajaran di kelas inklusi kurang optimal. Selain itu, temuan dilapangan berdasarkan studi pendahuluan adalah: a) tingkat kesiapan guru dan siswa dalam proses pembelajaran, b) sarana dan fasilitas

seperti tingkat kecepatan akses internet (wifi) di dalam kelas dikeluhkan oleh siswa, c) kreativitas guru dalam membuat animasi, video dan materi yang berorientasi pada IT masih rendah, dan d) banyaknya perbedaan jenis ketunaan yang dialami oleh mereka, sehingga guru membutuhkan pembelajaran inovatif salah satunya dengan menggunakan *I-Spring Suite*. Aplikasi pembelajaran yang memuat banyak fitur lengkap mulai dari materi, kuis/soal, video pembelajaran, dan lain-lain. Aplikasi ini juga memudahkan para guru dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada siswa baik reguler maupun inklusi.

Perbedaan jenis ketunaan yang dialami oleh siswa inklusi salah satunya yang paling banyak ditemukan di sekolah adalah ketunaan dengan jenis tunarungu. Siswa Tunarungu adalah siswa ABK dengan gangguan pendengaran yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari (Winarsih, 2007). Sebagai dampak ketunarunguan akan berpengaruh dan kesulitan bicara, hal tersebut berakibat pada tidak optimalnya dalam memahami konsep bacaan setiap materi pelajaran karena minimnya kosakata yang berakhir pada kesulitan dalam menangkap konsep pelajaran termasuk pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kondisi tersebut berdampak luas pada intelegensi dan kemampuan kognitif

yang berakibat pada rendahnya minat belajar siswa Tunarungu. Penyelesaian masalah yang kompleks ini dihadapi bersama oleh semua warga sekolah, dengan tujuan:

- a) Sebagai wujud nyata pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah, dimana PPKn yang dikenal sebagai mata pelajaran berorientasi pada karakter siswa. Hal ini membuktikan bahwa belajar PPKn tidak hanya sekedar memberikan pemahaman materi saja tetapi sebagai pembelajaran life long learning, pembelajaran bermakna, kontekstual, dan langsung berhubungan dengan kehidupan mereka secara nyata. Hal ini akan bermanfaat sekali bagi siswa Tunarungu yang memiliki gangguan pendengaran dalam memahami konsep berpikir PPKn baik secara audio maupun visual, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- b) Sebagai upaya membangun dan mengembangkan budaya inklusi di lingkungan SMKN 3 Probolinggo, dengan memperhatikan kebutuhan siswa tunarungu dalam setiap proses pembelajaran PPKn, memberikan rasa nyaman, kolaboratif, diterima, merasa berharga dan dihargai menjadi indikator keterlaksanaan budaya inklusi di dalam kelas dengan menciptakan nilai inklusif dalam lingkungan kelas dan sekolahnya. Karena dengan meningkatnya kemampuan siswa Tunarungu dalam setiap proses pembelajaran di kelas, berarti sudah terwujud kesetaraan hak

belajar, kewajiban dan peran mereka dalam kehidupan bersama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ainscow (2002) tentang index for inclusion: bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di SMKN 3 Probolinggo dibangun dari 3 dimensi, yaitu dengan mengembangkan budaya inklusif, kebijakan inklusif dan praktik inklusif.

- c) Sebagai wujud kebersamaan dan meningkatkan kemampuan siswa Tunarungu maka pemilihan model belajarnya adalah model pembelajaran Tutor Sebaya. Model pembelajaran Tutor Teman Sebaya (Ahmadi dan Supriono, 2004). Pembelajaran dengan tutor sebaya dapat terus meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai karakter kuroisitas, pantang menyerah, sikap kebersamaan, kerja keras dan berkompetisi sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No 23 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Hal ini juga didukung oleh Wahid, dkk (2018) yang menuturkan bahwa perbedaan yang dimiliki setiap manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pembelajaran pada satuan pendidikan sudah tidak muncul diskriminasi dan bullying atas ras, gender, fisik, agama, dan antar golongan/kelompok tertentu. Dengan demikian, pembelajaran PPKn yang mengedepankan aspek toleransi dan kebersamaan akan menjadi optimal manakala tidak terjadi konflik antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun guru dengan guru.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode berupa analitis deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Muchtar (2015) mengatakan bahwa makna kualitatif diartikan sebagai kegiatan berpikir secara sistematis untuk menekankan kebenaran dalam upaya memecahkan masalah penelitian secara terus-menerus. Obyek dan subyek riset dilakukan pada kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpras, guru pendamping inklusi, guru BK, dan siswa reguler, siswa inklusi kelas X sampai dengan XII di SMKN 3 Probolinggo. Lokasi penelitian berada di Jl. Pahlawan No. 26A Kota Probolinggo. Adapun SK Pendirian dengan Nomor 0342/U/1989 pada tanggal 5 Juni 1989 dengan memiliki 5 bidang kompetensi keahlian, diantaranya a) akomodasi perhotelan, b) tata boga, c) tata busana, d) tata kecantikan kulit dan rambut, dan e) desain komunikasi visual. SMK Negeri 3 Probolinggo memiliki tanah seluas 9653 m<sup>2</sup> dengan status milik pemerintah. Jumlah rombongan belajar yang ada sebanyak 30 rombel dengan lama waktu pembelajaran dimulai jam 06.45 s.d 15.50 WIB (5 hari kerja).

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Adapun dipilihnya purposive sampling dikarenakan informasi yang diperoleh harus berasal dari informan yang memiliki kompetensi dan pengalaman khususnya pada model/media pembelajaran berbasis android dan perkembangan siswa inklusi. Adapun informan pada penelitian ini

terdiri dari seorang kepala sekolah, 3 wakil kepala sekolah, 3 guru BK, 10 guru pendamping inklusi, 2 guru mapel yang menerapkan *i-spring suite*, 17 siswa inklusi dan 5 orang siswa reguler/normal. Penelitian ini telah mendapatkan izin dari wali murid dan sesuai berdasarkan pakta integritas yang disusun oleh peneliti bersama kepala sekolah, guru dan siswa terutama berkaitan dengan etika peneliti dan kerahasiaan informasi. Fokus pertanyaan melalui wawancara berupa kondisi dan perkembangan siswa dan hambatan yang dihadapi dalam pelayanan pembelajaran kelas inklusi.

Pengumpulan data juga memerlukan studi dokumentasi terutama untuk menganalisis kesesuaian visi misi sekolah dengan administrasi sekolah. Selain itu, kegunaan studi dokumentasi melihat sejauh mana perkembangan siswa inklusi yang masuk di SMK Negeri 3 Probolinggo berdasarkan data grafik dan buku induk sekolah.

### **III. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Kendala dan permasalahan dalam penggunaan aplikasi i-spring**

Faktor yang melatarbelakangi maju tidaknya tingkat satuan pendidikan bergantung pada aspek manajemen (Sutanto, 2010). Manajemen/pengelolaan pendidikan seharusnya dikelola bersama dengan dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak hanya memahami, tetapi mampu memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh sekolahnya. Kendala-kendala yang terjadi di lingkungan SMK Negeri 3 Probolinggo, yakni sebagai berikut:

a) Untuk guru; ada beberapa guru yang takut install *I-Spring Suite*, sebab dikhawatirkan banyaknya virus yang masuk pada laptop mereka. Tetapi untuk tahun akademik 2019-2020, banyak guru yang antusias ingin menerapkan model pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif menjadi tuntutan guru untuk menerapkan model pembelajaran berbasis *Science, Technology, Engenering, Art, dan Mathematics* (STEAM). Dengan menerapkan model pembelajaran berbasis STEAM sangat relevan dengan aplikasi *I-Spring Suite*. *I-Spring Suite* hadir menawarkan kemudahan dalam proses belajar mengajar di kelas khususnya pada guru dan siswa. Guru juga dapat melakukan pemberian soal melalui *google form, edmodo, dan google class*, sehingga siswa dapat melaksanakan pengerjaan soal/pertanyaan yang dibuat oleh guru dengan baik dan lancar.

Perlunya pelaksanaan pelatihan, lokakarya, workshop, diklat metodologi model, strategi dan media pembelajaran baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah juga sangat penting untuk dilakukan oleh semua guru. Sehingga kompetensi dan motivasi guru dalam proses belajar mengajar semakin meningkat.

b) Untuk siswa; ada beberapa siswa yang masih belum memiliki hp android/gadget. Selain itu, adanya kebijakan sekolah yang melarang siswa dalam menggunakan dan mengaktifkan gadget pada saat proses pembelajaran, kecuali karena seizin guru mata pelajaran. Artinya

bahwa penggunaan gadget diperuntukkan untuk menganalisis materi pelajaran dan pengerjaan soal baik secara individu maupun secara kelompok. Terkadang banyak wali murid dan beberapa guru mapel melarang siswa dalam penggunaan gadget pada saat pembelajaran di kelas. Padahal melarang pada tahap siswa SMK, akan mengakibatkan mereka memunculkan rasa penasaran dan ingin tahu. Oleh karena itu, perlunya pemahaman bersama antara wali murid, kepala sekolah dan guru dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, interaktif, menarik dan menyenangkan dengan berbasis android/laptop bagi mereka, khususnya untuk siswa ABK/inklusi.

- c) Sarana dan prasarana: kecepatan wi-fi atau internet masih menjadi kendala dalam mendukung proses pembelajaran. Padahal sudah ada proses penambahan penyediaan wifi pada sumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lebih dari itu, program gratis berkualitas (Tistas) yang menjadi program unggulan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk setiap sekolah menengah (SMA/SMK) akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Pada tahun akademik 2019-2020, rencana penambahan di beberapa sektor/area sekolah terkait pemasangan wifi terutama disudut yang strategis dapat segera terealisasi, sehingga hal ini memberikan kemudahan dan pelayanan maksimal pada mereka;
- d) Ketergantungan operator/IT sekolah; pada saat pelaksanaan ujian (UAS dan

UNBK) bergantung pada operator dalam hal sinkronisasi soal dengan gadget siswa. Dalam pelaksanaan ujian pada tahun akademik 2018/2019 yang dilaksanakan oleh sekolah, jenis penilaian pendidikan sudah berbasis gadget/android. Namun, sinkronisasi soal UAS belum dipasrahkan sepenuhnya kepada pengawas ujian. Ketergantungan pada operator sekolah dalam menjalankan sinkronisasi juga dapat menghambat keberlangsungan proses pembelajaran. Selain itu, adanya kecemburuan pemberian fee ujian antara guru pengawas ruang dan operator sekolah. Besaran fee ujian yang diterima oleh operator sekolah sangat banyak dibandingkan dengan guru pengawas ujian. Sebab, ujian akan terlaksana bilamana aplikasi soal yang ada pada laptop sekolah dan gadget siswa telah tersinkron dan itu hanya dapat dilakukan oleh 1-2 orang yang menjadi operator sekolah. Sehingga upaya yang dilakukan pada jenis penilaian siswa baik yang diselenggarakan oleh sekolah maupun oleh guru mapel akan diambil alih oleh guru yang bersangkutan. Guru memanfaatkan aplikasi *edmodo* dan *google class* yang sudah dimiliki sekolah dan semua guru mapel. Guru juga dapat memanfaatkan *google form* dalam pemberian ujian. Guru sudah tidak perlu mengoreksi dan menganalisis soal yang dikerjakan siswa. Sebab, secara otomatis akan masuk pada email guru terkait hasil dan analisis ujian mereka.



## **b. Upaya Sekolah dalam Menangani Berbagai Permasalahan**

Permasalahan yang begitu kompleks ini dapat diatasi jika proses *bottom up* dan *top down* berkorelasi dengan baik dan maksimal. Guru harus memiliki komitmen untuk menerapkan proses pembelajaran dengan memanfaatkan IT sebagai paradigma belajar kontekstual dan modern. Penguatan metodologi pembelajaran perlu dilakukan oleh semua guru, sehingga pembelajaran tidak monoton dengan metode ceramah sebagai andalannya. Kesempatan siswa dalam menanggapi dan menyampaikan ide sulit ketika guru berpacu dengan waktu. Materi dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sekian banyak harus selesai dikerjakan oleh guru, tanpa memperhatikan respon dari siswa, khususnya siswa inklusi.

Oleh karenanya, sekolah memiliki inisiatif dengan mendatangkan pakar/ahli di bidang pembelajaran berbasis IT. Kehadiran pakar berinisial DA disamping menjadi guru berprestasi tingkat nasional pada tahun 2018, beliau juga sebagai kepala sekolah di SMKN 7 Jember memiliki pengalaman dalam proses pembelajaran interaktif dan menarik. Tidak hanya itu, sekolah juga menghadirkan pengawas sekolah tingkat SMA/SMK Negeri/Swasta se-Kota/Kabupaten Probolinggo. Hal ini bagus dalam memotret kondisi dan motivasi guru dalam melayani siswa secara prima dan optimal.

Dalam proses pembelajaran interaktif, SRH sebagai kepala SMK Negeri 3 Probolinggo bersungguh-sungguh memiliki komitmen kuat dalam

pemanfaatan proses pembelajaran IT. Tidak hanya aplikasi *I-Spring Suite* yang ditawarkan, tetapi juga ada *google classroom*, aplikasi *edmodo* sekolah yang digunakan dalam pelatihan. Selain itu, penyusunan soal secara online dengan template yang diseragamkan dan pelatihan soal ujian melalui *google form* juga turut hadir dipahami oleh guru. Sekolah juga berupaya menambah link terhadap kuota dan daya kecepatan wifi. Harapannya setiap kelas akan diletakkan jaringan internet guna memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, upaya sekolah dalam memberikan kemudahan dan pelayanan pada siswa sudah maksimal. Pengerjaan soal baik ulangan harian maupun penilaian akhir sekolah sudah tidak lagi menggunakan operator sekolah dalam sinkronisasi soal ujian. Sebab, setiap guru sudah bisa mengoperasikan dan mulai terbiasa memberikan soal langsung dapat dilihat di gadget/laptop siswa.

## **IV. KESIMPULAN**

Sekolah inklusi merupakan suatu lembaga pendidikan kreatif dan kontemporer yang memadukan lingkungan dan dunia pendidikan berbeda yang dialami oleh siswa. Siswa akan diterima pada lingkungan baru manakala dia berhasil beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Kesulitan yang dialami oleh siswa inklusi selama ini adalah mereka sudah nyaman dengan komunitas sebelumnya dan membutuhkan waktu yang lebih lama mereka mengenal dan memahami

karakter teman sekelasnya. Masalah juga datang dari guru, manakala inovasi dan kreativitas guru masih rendah. Selain itu, pengetahuan dan kesiapan guru dalam proses pembelajaran serta metodologi yang digunakan juga minim, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan baik lokakarya ataupun workshop terkait metodologi pembelajaran berbasis IT.

Pada era digital seperti saat ini, sudah semestinya guru melek teknologi. Teknologi selalu terikat dengan aktivitas pada kehidupan sehari-hari terutama dalam lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil pendidikan dan pelatihan terkait kompetensi guru dalam penggunaan media digital (*I-Spring Suite*), guru sangat antusias dalam menerima informasi dan langsung dipraktikkan oleh mereka. Tidak hanya dialami oleh guru PPKn tetapi juga guru pada mata pelajaran lainnya berkontribusi besar dalam membangun percepatan mutu pendidikan di SMK Negeri 3 Probolinggo. Hal ini juga berkaitan dengan kegiatan siswa di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, mereka tidak lepas dari gadget ditangannya tak terkecuali siswa inklusi. Tidak hanya siswa reguler yang ditemukan oleh peneliti, ternyata siswa inklusi lebih senang belajar menggunakan gadget/android dibandingkan belajar menggunakan buku. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi *I-Spring Suite* memiliki

hubungan kuat dengan aktivitas mereka. Sebab, aplikasi ini tidak hanya dapat dilakukan secara online tetapi juga offline. Selanjutnya, latihan soal, materi dan video pembelajaran berbasis audio visual yang dibuat guru dapat dikirim melalui grup whatsapp dan telegram kelas, sehingga nantinya dapat dipelajari oleh mereka baik pada saat di rumah maupun di sekolah.

Perbaikan berkelanjutan sangat diharapkan dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti membutuhkan saran dari berbagai pemangku kepentingan khususnya pemerintah. Monitoring dan evaluasi terkait perkembangan pemerintah diharapkan memiliki kontribusi dan lebih diaktifkan secara maksimal guna mengoptimalkan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi seluruh siswa pada sekolah inklusi. Salah satunya dengan penerapan media digital berbasis IT, yakni *I-Spring Suite*. Melalui penelitian ini juga diharapkan pemerintah bekerjasama dengan sekolah dan masyarakat duduk bersama baik secara *bottom up* maupun *top down* dalam menangani permasalahan yang dialami oleh siswa inklusi. Sebab, mereka datang dengan berada pada lingkungan baru, teman baru, yang sebelumnya belum pernah dikenalnya. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan oleh mereka (*special needs*).





## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi dan Supriono. (2004). Psikologi Belajar. Jakarta : Rhineka Cipta
- Booth, T dan Ainscow, M. (2002). Index For Inclusion. Developing Learning and Participation in School, London: CSIE.
- Basit, A. (2019). Pemberian Materi pada Diklat Guru untuk Pendidikan Inklusi. Probolinggo: SMK Negeri 3 Probolinggo
- Muchtar, S, A. (2015). Dasar penelitian kualitatif. Bandung: Gelar Potensi Mandiri.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- Permendikbud No 23 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
- Sutanto, J. (2010). Determinan Mutu Proses dan Hasil Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan. Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Vol. 17 No. 3.
- Wahid, A., dkk. (2018). Learning Development Based On Multicultural In Inclusion School. Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 12 No. 2.